



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: <b>II (Dua).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: <b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 28 Januari 2020.</b>
Pukul	: <b>15.00 – Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.H., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan struktur Kemendikbud RI berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2019 dan Permendikbud Nomor 45 tahun 2019;</li><li>2. Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbud RI TA 2019 dan Persiapan TA 2020, khususnya sarana dan prasarana Pendidikan;</li><li>3. Evaluasi Pelaksanaan DAK Pendidikan TA 2019 dan Persiapan Pelaksanaan DAK tahun 2020.</li><li>4. Kondisi sarana prasarana pendidikan di daerah bencana dan kelangsungan proses belajar mengajar.</li><li>5. lain-lain.</li></ol>
Hadir Komisi X DPR RI	: 41 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI /Sdr. Nadiem Anwar Makarim beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.39 WIB oleh **H. Syaiful Huda**/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

### A. Struktur Kemendikbud RI berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2019 dan Permendikbud Nomor 45 tahun 2019

1. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk memasukan pendidikan nonformal-informal/dikmas menjadi salah satu direktorat dalam struktur Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI, melalui perubahan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud RI.
2. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk mengakomodir UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) dan UU Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, untuk menunjang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk segera menyelesaikan pengisian jabatan struktur organisasi Kemendikbud RI sesuai Perpres 82 Tahun 2019 Tentang Kemendikbud.

### B. Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbud RI TA 2019 dan Persiapan TA 2020, khususnya sarana dan prasarana Pendidikan

1. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan melakukan Raker untuk membahas pergeseran anggaran, program, pagu dan jenis belanja di Kemendikbud RI pada APBN TA 2020 pasca terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2019, paling lama tanggal 20 Februari 2020, dengan catatan didahului RDP dengan Pejabat Eselon I dan bahan Raker diserahkan 2 hari sebelum raker dilaksanakan, sesuai Pasal 256 ayat (1) Tatib DPR RI.
2. Mengenai kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk:
  - a. memastikan landasan hukumnya dan menyerahkan dokumen hasil kajian/riset atau Naskah Akademiknya.
  - b. menyempurnakan turunan kebijakannya antara lain mengenai zonasi dalam PPDB, pendidikan karakter, Assesment Kompetensi Minimum dan survey karakter, serta pemagangan mahasiswa.
  - c. memperhatikan kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia.

3. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat untuk melakukan pendalaman tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun sebelum tanggal 20 Februari 2020.
4. Dalam rangka mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan koordinasi dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) agar anggaran penelitian atau penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi tetap berada di Kemendikbud RI.
5. Dalam upaya memaksimalkan pemagangan mahasiswa, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk kerjasama dengan pihak ketiga (Dunia Usaha dan Dunia Industri)
6. Dalam rangka menangkal radikalisme di lingkungan pendidikan, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk meningkatkan efektivitas pendidikan karakter berbasis ideologi Pancasila.
7. Dalam rangka implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk mengajukan peningkatan anggaran pada kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan.

**C. Evaluasi Pelaksanaan DAK Pendidikan TA 2019 dan Persiapan Pelaksanaan DAK tahun 2020**

Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Kemenkeu RI agar Kemendikbud RI bersama DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan.

**D. Kondisi sarana prasarana pendidikan di daerah bencana dan kelangsungan proses belajar mengajar**

Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk mengalokasikan anggaran secara khusus dalam setiap perencanaan anggaran Kemendikbud RI di setiap tahun anggaran, dengan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu RI.

**E. Lain-lain**

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan percepatan terhadap proses penyusunan Revisi RUU Tentang Sisdiknas dan menyampaikan perkembangannya kepada Komisi X DPR RI.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI berkoordinasi dengan K/L terkait untuk memperjuangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan kategori K2 dan Non Kategori menjadi PNS atau PPPK.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran beasiswa S3 Tahun Anggaran 2018 dan 2019

4. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 14 Februari 2020

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 01.40 WIB (hari Rabu, 29 Januari 2020)

MENDIKBUD RI,



**NADIEM ANWAR MAKARIM**

KETUA,



**H. SYAIFUL HUDA**